



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/36/HM.01/IV/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA
DALAM MENGHADAPI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan pengaruh di bidang sosial dan ekonomi sehingga perlu dilakukan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha;
- b. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
12. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3/M/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi Pandemi Covid-19;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 29 April 2020

Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR 5/36/HM.01/IV/2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA
DALAM MENGHADAPI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus penyakit pneumonia dengan penyebab yang tidak jelas di Kota Wuhan, China. Kasus ini terus berkembang hingga melewati batas-batas negara dan pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan penyakit tersebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19). Kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Secara global, upaya penyebaran COVID-19 yang telah dilakukan di berbagai negara antara lain karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di

Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara.

Untuk mencegah penyebaran yang semakin luas di wilayah Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan serta menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan sosial, penghentian kegiatan pendidikan di sekolah/ perguruan tinggi, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas.

Dampak pandemi COVID-19 memiliki karakteristik yang berbeda karena dampaknya tidak seperti bencana alam biasanya, cakupan dari pandemi COVID-19 akan sangat luas melewati batas-batas geografis negara. Pandemi COVID-19 mempunyai dampak kelumpuhan pelayanan, gangguan keamanan dan ketertiban sosial serta kerugian ekonomi serta menyebabkan lumpuhnya aktivitas transportasi, keterbatasan arus uang dan barang, perubahan tingkat permintaan barang dan jasa, berkurangnya perjalanan, tuntutan kebutuhan makanan, meningkatnya angka absensi pekerja, meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan upaya penanggulangan pandemi COVID-19.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 pada sektor usaha diperlukan penyusunan rencana keberlangsungan usaha. Perencanaan keberlangsungan usaha merupakan suatu perencanaan yang dibuat oleh perusahaan dalam rangka mengurangi penyebaran virus penyebab pandemi COVID-19 dengan tetap mempertahankan keberlangsungan usaha.

II. TUJUAN

1. Tujuan umum:

Melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 dan mencegah penyebaran virus penyebab pandemi Covid-19 di perusahaan.

2. Tujuan khusus:

- a. Mengurangi penyebaran penyakit yang menyebabkan pandemi di perusahaan untuk menurunkan jumlah kesakitan serta kematian;
- b. Membantu pengusaha agar dapat mengantisipasi kondisi darurat kesehatan dan kegiatan usahanya tetap berjalan baik selama pandemi Covid-19;
- c. Membantu manajemen perusahaan dalam menyusun strategi menghadapi pandemi Covid-19;
- d. Mengurangi dampak negatif ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman ini disusun sebagai pedoman umum bagi perusahaan untuk menyusun rencana keberlangsungan usahanya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pedoman ini berisi tentang kebijakan nasional menghadapi pandemi Covid-19 dan pedoman yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah penyusunan rencana keberlangsungan usaha.

Pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk pengusaha, manajemen perusahaan, HSE, P2K3, HRD, pekerja, bipartit (antara pengusaha dan pekerja), dan pelayanan kesehatan kerja.

BAB II

PANDEMI COVID-19

DAN KEBIJAKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. PANDEMI COVID-19

Pandemi atau epidemi global atau wabah global merupakan terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografi yang luas. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), suatu pandemi dikatakan terjadi bila ketiga syarat berikut telah terpenuhi yaitu timbulnya penyakit bersangkutan merupakan suatu hal baru pada populasi bersangkutan, agen penyebab penyakit menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit serius, serta agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia.

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan kemudian menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020. Selanjutnya dengan mempertimbangkan penyebaran penyakit ini yang luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, maka Pemerintah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020.

II. KEBIJAKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

a. Kebijakan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan

pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Setelah adanya ketetapan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat maka Pemerintah melakukan Kekarantinaan Kesehatan berupa:

1. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
3. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
4. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang dilanjutkan dengan tindakan kekarantinaan kesehatan dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha selain dampak yang diakibatkan oleh penyakit itu sendiri. Karena inti kekarantinaan kesehatan adalah meminimalkan penularan dengan cara meminimalkan kontak yang dilaksanakan melalui suatu tindakan diantaranya berupa pembatasan sosial bersekala besar sehingga dapat menimbulkan dampak bagi perusahaan yang berada di dalam maupun disekitar wilayah kekarantinaan kesehatan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dampak dilaksanakannya pembatasan sosial diantaranya:

- 1) Kegiatan usaha yang berada dalam wilayah pembatasan sosial:
 - a) Penghentian/pembatasan sementara kegiatan usaha;
 - b) Gangguan arus suplai barang dan jasa;
 - c) Ketidakhadiran pekerja cukup signifikan;

- d) Terganggunya mobilitas pekerja;
 - e) Terganggunya kegiatan operasional usaha;
 - f) Perubahan tingkat permintaan barang/jasa;
 - g) Kerugian financial usaha.
- 2) Kegiatan usaha yang berada diluar wilayah pembatasan sosial:
Kegiatan usaha yang berada diluar wilayah pembatasan sosial tetap mempunyai potensi untuk mengalami dampaknya apabila :
- a) Pekerja yang berasal dari wilayah pembatasan sosial tidak dapat bekerja;
 - b) Suplai barang dan jasa terganggu bila sumber suplai berasal atau terhalang oleh wilayah pembatasan sosial.

b. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang mungkin terjadi pada kegiatan usaha dapat berupa:

1. Ketidakhadiran tenaga kerja.

Tenaga kerja tidak masuk bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) mereka menjadi korban (sakit/meninggal);
- 2) harus merawat keluarga yang sakit; dan
- 3) pembatasan pergerakan orang.

2. Menurunnya atau terganggunya pasokan bahan baku.

Pasokan yang terganggu dapat disebabkan karena berkurangnya produksi, terganggunya transportasi atau karena ketergantungan antar perusahaan.

3. Perubahan demand/kebutuhan dari konsumen.

Kebutuhan konsumen akan barang-barang terkait dengan upaya pencegahan, bahan makanan, dan kebutuhan penting lainnya akan meningkat secara dramatis, sedangkan kebutuhan lain yang bukan prioritas mungkin akan turun drastis.

Jika kondisi-kondisi diatas tidak diantisipasi dengan baik, kemungkinan terjadinya kelumpuhan dari sektor vital (listrik, komunikasi, dan lain-lain) dapat memicu terjadinya gangguan yang lebih luas pada perekonomian maupun menimbulkan masalah sosial.

BAB III

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Pengusaha atau pengurus perusahaan harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan upaya pencegahan lainnya di perusahaan protokol kesehatan sehingga keberlangsungan usaha dapat terjamin dan meningkatkan ketahanan dalam situasi *emergency* serta ikut berkontribusi dalam perlindungan kesehatan masyarakat secara umum.

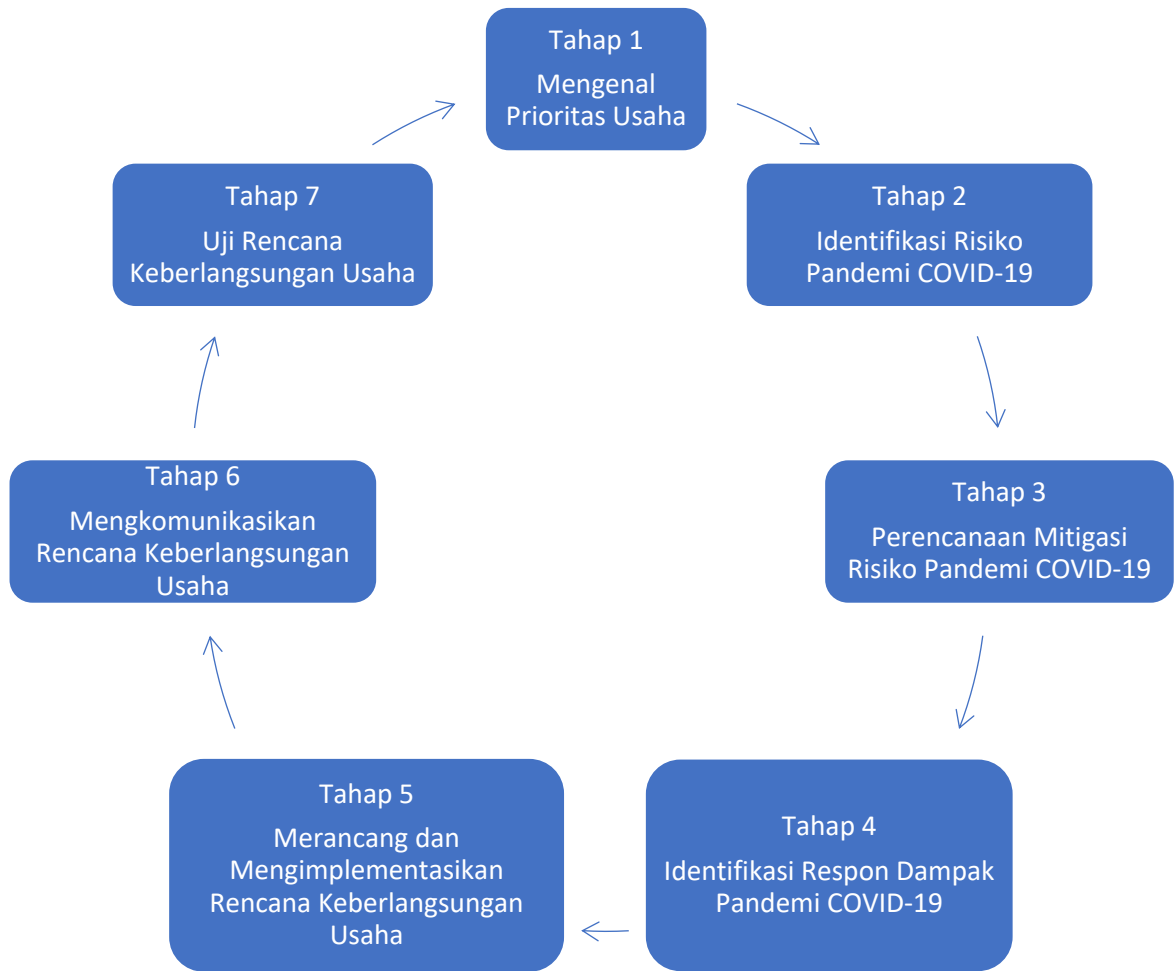
Untuk mempertahankan kegiatan usaha selama pandemi COVID-19, manajemen perusahaan harus menyusun perencanaan keberlangsungan usaha. Perencanaan keberlangsungan usaha ini dimaksudkan untuk mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada dalam rangka mendukung kegiatan esensial dalam perusahaan.

Dalam penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha, perlu membentuk tim yang bertanggung jawab untuk:

1. menyusun rencana kesiapsiagaan;
2. melakukan kaji ulang;
3. ujicoba rencana kesiapsiagaan (tabletop, drill, simulasi dll);
4. menyempurnakan rencana kesiapsiagaan.

Jika perusahaan telah mempunyai rencana kesiapsiagaan menghadapi kegawatdaruratan/ *emergency* terhadap potensi bahaya (*hazard*) yang lain, akan lebih mudah dalam penyusunan perencanaan ini karena dapat menyesuaikan rencana kesiapsiagaan yang sudah ada dengan asumsi dampak yang akan ditimbulkan pandemi COVID-19.

Penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



Keikutsertaan perwakilan serikat pekerja sangat dianjurkan pada setiap tahapan proses perencanaan

a. TAHAP 1: MENGENAL PRIORITAS USAHA

1. Menentukan produk/ layanan utama usaha.

a) Tujuan:

- 1) Mengidentifikasi produk/jasa layanan utama dari perusahaan.
- 2) Membuat peringkat produk/jasa layanan utama berdasarkan tingkat prioritasnya.

Penyusunan peringkat ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- i. Produk/layanan mana yang memberikan kontribusi paling besar/penting atas usaha?
- ii. Seberapa besar faktor eksternal berpengaruh pada penyediaan produk/layanan utama tersebut, semakin besar pengaruh faktor eksternal, semakin sulit untuk memastikan keberlangsungan usaha.

b) Output:

Daftar produk/jasa layanan utama perusahaan dan pemeringkatannya. Daftar peringkat dari produk/layanan utama ini perlu diperbaharui secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan situasi pandeminya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1 : Buatlah daftar produk/jasa layanan utama perusahaan.

Langkah 2 : Buatlah peringkat (prioritas) produk/jasa layanan utama perusahaan.

Variabel yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemeringkatan diantaranya adalah tanggal jatuh tempo waktu pemesanan, jumlah SDM, ketersediaan SDM, bahan baku hingga potensi keuntungan.

Langkah 3 : Diskusikan kembali dengan team, apakah pemeringkatan tersebut sudah sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Pilihlah beberapa produk/jasa utama yang paling layak.

Pertimbangkan bahwa keberlangsungan perusahaan terjamin dengan melakukan prioritas usaha.

Bila dalam melakukan pemeringkatan diatas terdapat produk/jasa yang tidak terpilih sebagai prioritas usaha, bukan berarti produk/jasa tersebut akan diabaikan; namun saat ini tidak menjadi prioritas utama. Produk/jasa tersebut akan dilaksanakan kembali pada saat kondisi kembali normal pasca pandemi COVID-19.

2. Aktivitas/kegiatan usaha.

a) Tujuan:

Mengidentifikasi aktivitas /proses inti yang mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa utama perusahaan.

b) Output

1) Daftar aktivitas /proses inti yang menghasilkan produk/jasa

2) Alternatif dalam melaksanakan kegiatan ini

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1 : Buatlah daftar keseluruhan aktivitas/proses produk/jasa layanan utama perusahaan yang sudah diprioritaskan sebelumnya.

Langkah 2 : Pilihlah aktivitas/proses inti yang mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa layanan utama.

Dalam melakukan identifikasi aktivitas/kegiatan usaha yang esensial tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Apakah aktivitas/kegiatan usaha tersebut bisa dihentikan sementara tanpa mengganggu hasil akhir?
- 2) Apakah aktivitas/kegiatan yang esensial yang sulit dilakukan, tetapi relatif mudah dilakukan oleh pihak luar?
- 3) Adakah alternatif cara yang berbeda dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan esensial tersebut tanpa mengganggu produktivitas? (misalnya: penggabungan dua aktivitas produksi).

3. Dukungan terhadap aktivitas/kegiatan yang esensial.

Setelah menentukan aktivitas/proses inti yang menentukan keberlangsungan perusahaan, untuk memastikan aktivitas inti tersebut tetap berjalan lancar maka diperlukan dukungan. Langkah berikut akan membantu dalam menentukan dukungan yang diperlukan.

a) Tujuan

Mengidentifikasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas/kegiatan inti yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Untuk mengindentifikasikannya, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Siapa kepala bagian/penanggung jawab yang mengawasi aktivitas-aktivitas penting tsb?
- 2) Bagaimana distribusi tanggung jawabnya?
- 3) Apakah pengetahuan dan kemampuan menjalankan aktivitas/kegiatan di bagian tersebut dimiliki oleh semua pekerja dibagian tersebut?
- 4) Bisakah para pekerja dibagian tersebut dapat saling bertukar peran dengan mudah?

b) Output

- 1) Posisi pekerja kunci dan alternatif penggantian karyawan yang berhalangan.
- 2) Menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan; semisal bahan baku, BBM, spare part mesin, teknologi informasi, administrasi personalia dan keuangan.

c) Langkah Pelaksanaan

Langkah 1 : Buatlah daftar hierarki staff/posisi di aktivitas inti.

Langkah 2 : Tentukan lingkup tanggungjawab dan kecakapan yang disyaratkan setiap posisi.

Apakah pengetahuan dan kemampuan menjalankan aktivitas/kegiatan di suatu bagian dimiliki oleh semua pekerja dibagian tersebut?

Langkah 3 : Jika ada karyawan berhalangan bekerja, apakah dapat digantikan oleh karyawan lain?

1) Dapatkah pekerja dibagian tersebut dapat saling bertukar peran dengan mudah?

2) Apakah perlu suatu tim tertentu untuk menggantikan posisi yang berhalangan?

Langkah 4 : Identifikasi dukungan lain yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya aktivitas-aktivitas penting tersebut. Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan dalam menentukan jenis dukungan yang diperlukan.

1) Sumber daya apa yang diperlukan dalam menjaga aktivitas penting tersebut tetap berfungsi? (IT, logistik, power suplai, dan lain-lain)

2) Dalam situasi apa, perusahaan akan meningkatkan/menurunkan/menyesuaikan sumber daya/dukungan tersebut?

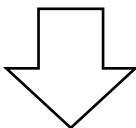
3) Berapa lama perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usaha dengan jumlah sumber daya yang ada? Berapa jumlah sumber daya minimal yang dibutuhkan untuk menjaga kegiatan usaha tetap berjalan?

Contoh Pelaksanaan Tahap 1

PT. XYZ
(Perusahaan Pertenunan)

PRIORITAS UTAMA

No	Produk/Layanan Utama Usaha	Aktivitas/Layanan Penting	Produk/Layanan Utama Usaha
1.	Kain mentah/grey	1. Penerimaan/pengeluaran benang dari gudang benang. 2. Penerimaan/pengeluaran bahan-bahan penunjang. 3. Warping. 4. Tying. 5. Sizing. 6. Weaving. 7. Inspecting & packing. 8. Penyimpanan kain mentah dalam gudang kain. 9. Pengiriman.	• Sumberdaya manusia. • Sistem administrasi dan keuangan. • Mesin-mesin produksi. • Pasokan bahan baku dan bahan penunjang. • Pasokan listrik. • Pasokan BBM.



Dan seterusnya

b. TAHAP 2: IDENTIFIKASI RISIKO PANDEMI COVID-19

Setelah mendapatkan daftar prioritas produk/layanan serta teridentifikasinya aktivitas dan faktor pendukungnya pada Tahap 1, perlu dilakukan upaya identifikasi risiko pandemi COVID-19 terhadap komponen-komponen yang telah teridentifikasi tersebut. Pada tahap ini, akan dilakukan upaya melakukan penilaian risiko, sehingga akan didapatkan prioritas-prioritas dari skenario ancaman untuk dilakukan upaya mitigasi maupun respon pada tahap berikutnya.

Penilaian risiko harus dilakukan secara kerja tim dengan mempertimbangkan tiga komponen penting, yaitu:

1. Identifikasi skenario ancaman yang mungkin terjadi

Skenario perlu dikembangkan secara spesifik sesuai dengan kondisi perusahaan. Skenario harus dibuat dari yang paling ringan sampai paling berat. Semua kemungkinan perlu diidentifikasi dan didaftar, untuk kemudian dilakukan skoring untuk menentukan skenario yang akan digunakan.

Analisa bisa dilakukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya (probabilitas) dan tingkat keparahan ancaman tersebut.

a) Tujuan

- 1) Mengidentifikasi skenario ancaman-ancaman yang mungkin terjadi pada saat pandemi COVID-19.
- 2) Mengukur bobot skenario ancaman yang mungkin terjadi.

b) Output

- 1) Daftar skenario ancaman yang potensial timbul sebagai akibat dari pandemi COVID-19.
- 2) Menilai bobot skenario ancaman yang mungkin terjadi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1 : Petakanlah skenario ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan.

Skenario ancaman ini dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, dalam konteks terkait dengan pandemi COVID-19.

Langkah 2 : Berikan bobot pada skenario ancaman yang sudah diidentifikasi berdasarkan dua variabel yaitu: tingkat kemungkinan terjadinya ancaman (probabilitas), dan tingkat keparahan

(*severity*) jika ancaman itu terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Penentuan *scoring* ini berdasarkan kesepakatan bersama dari tim manajemen yang menyusun Rencana kesiapsiagaan. Skoring sangat bersifat relatif dan berlaku spesifik pada perusahaan masing-masing.
- 2) Setiap skenario ancaman yang teridentifikasi dianalisa berdasarkan tingkat probabilitas dan keparahan ancaman tersebut.
- 3) Skala untuk pembobotan skenario ancaman berada pada rentang 1-5, dengan angka 1 untuk tingkat terendah dan 5 untuk tertinggi.

Langkah 3 : Gunakan Tabel Pembobotan Skenario Ancaman sebagai acuan pemberian bobot pada setiap skenario ancaman.

Langkah 4 : Pilihlah minimal lima ancaman (bisa lebih) dengan bobot tertinggi yang mungkin terjadi di perusahaan.

Tabel Referensi
Pembobotan Skenario Ancaman

		KEMUNGKINAN TERJADINYA			
		Sangat Besar	Besar	Sering	Sangat Kecil
		A	B	C	D
TINGKAT KEPARAHAN	Kategori I	5	5	4	3
	Kategori II	5	4	3	2
	Kategori III	4	3	2	1
	Kategori IV	3	2	1	1
Peringkat Ancaman Threat Assessment Code (TAC)					
Keparahan		Bobot Skenario Ancaman			
Kategori I = Sangat Parah		1 =Dapat diabaikan			
Kategori II = Parah		2 = Kecil			
Kategori III = Sedang		3 = Sedang			
Kategori IV = Ringan		4 = Serius			
		5 = Kritis			

2. Analisis kerentanan terhadap kegiatan usaha
- Analisa kerentanan terhadap kegiatan usaha, menjadi salah satu komponen untuk melakukan penilaian risiko. Perlu dipetakan titik-titik kerentanan dalam organisasi pada setiap skenario ancaman yang telah teridentifikasi. Ada beberapa contoh variabel yang dapat dipergunakan, misal: SDM, material produksi, fasilitas peralatan, keuangan, pemasaran, manajemen informasi, dan lain-lain.
- a) Tujuan
- 1) Mengidentifikasi kerentanan organisasi yang terkait langsung dengan setiap skenario ancaman.
 - 2) Mengukur bobot setiap kerentanan yang teridentifikasi.

b) Output

Daftar kerentanan dalam organisasi yang terkait langsung dengan setiap skenario ancaman beserta bobotnya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Petakan titik-titik kerentanan (*vulnerability*) dalam organisasi anda pada setiap prioritas skenario ancaman yang teridentifikasi.

Variable yang harus diperhitungkan adalah:

- a) Kerentanan pada faktor SDM, misalnya: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesadaran untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman infeksi.
- b) Kerentanan pada faktor material produksi; semisal kondisi stok dan tingkat ketergantungan pada pemasok.
- c) Kerentanan pada faktor fasilitas dan peralatan; semisal ketergantungan pada PLN dan pasokan suku cadang.
- d) Kerentanan pada faktor keuangan; semisal cashflow perusahaan yang terbatas dan, beban kredit bank.
- e) Kerentanan pada faktor pemasaran; semisal coverage pasar dan ketergantungan pada partner distributor.
- f) Kerentanan pada faktor manajemen informasi; semisal tidak adanya sistem jaringan informasi internal dalam perusahaan.
- g) Kerentanan pada faktor keamanan korporat dan keselamatan kerja karyawan; semisal terbatasnya petugas Satpam dan peralatan keamanan atau ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan peralatan keselamatan kerja.

Penting untuk diperhatikan, bahwa tidak semua variabel diatas akan muncul pada sebuah skenario ancaman. Contoh: ancaman tersebarnya virus dalam lingkungan

perusahaan, akan terkait langsung dengan pengetahuan karyawan terhadap penyakit tersebut, cara pencegahan dan pemahamannya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (kerentanan pada faktor SDM, Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Langkah 2: Berdasarkan variabel diatas, lakukan pembobotan terhadap kerentanan organisasi yang terkait langsung dengan setiap skenario ancaman. Pembobotan dengan menggunakan skala: yaitu nilai 5 untuk bobot yang tertinggi dan nilai 1 untuk bobot terendah.

Penentuan bobot dilakukan bersama dalam tim, bersifat relatif dan dapat berubah sesuai kondisi perusahaan.

3. Analisis kemampuan (*capability*) perusahaan

Komponen terakhir yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian risiko adalah kemampuan dari perusahaan itu sendiri dalam mengendalikan setiap skenario ancaman pandemi.

a) Tujuan

- 1) Mengidentifikasi kemampuan (*capability*) perusahaan dalam mengendalikan setiap skenario ancaman yang menjadi prioritas.
- 2) Mengukur bobot kemampuan perusahaan untuk menghadapi ancaman.

b) Output

Daftar kerentanan dalam organisasi yang terkait langsung dengan setiap skenario ancaman beserta bobotnya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Petakanlah kemampuan (*capability*) perusahaan dalam menghadapi setiap skenario ancaman yang telah diprioritaskan.

Variabel-variabel yang dapat dipergunakan untuk melakukan skoring terhadap kemampuan perusahaan adalah:

- 1) Kemampuan sumber daya manusia
- 2) Kemampuan teknis (fasilitas dan peralatan)
- 3) Kemampuan finansial

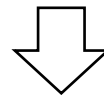
Langkah 2: Lakukan pembobotan terhadap setiap kemampuan yang teridentifikasi. Pembobotan menggunakan skala 1 - 5, yaitu bobot 5 untuk bobot tertinggi dan 1 untuk bobot terendah.

Penentuan dari bobot ini dilakukan dalam satu dan bersifat relatif yang dapat berubah sesuai kondisi perusahaan.

Contoh Pelaksanaan Tahap 2

PT. XYZ
(Perusahaan Pertenunan)
IDENTIFIKASI RISIKO

No	Skenario Ancaman	Analisa Ancaman			Kerentanan Organisasi		Kemampuan Organisasi		Nilai Risiko
		Kemungkinan	Keparahan	Bobot	Identifikasi	Bobot	Identifikasi	Bobot	
1	Karyawan sakit >30%	Tinggi	Tinggi	5	• Perilaku hidup bersih sehat karyawan • Kebersihan pabrik • Sirkulasi udara dalam ruang produksi	4	• Kemampuan operator mesin untuk ditambah beban kerjanya. • Pelayanan Kesehatan Kerja/Klinik perusahaan • Penyediaan sarana APD	2	10
2	Pasokan benang terganggu	Tinggi	Tinggi	5	• Jumlah perusahaan produsen benang lokal • Naiknya harga benang	5	Menambah stok benang Cashflow	3	8.3
3	Pencurian dalam perusahaan	Tinggi	Sedang	3	Hubungan sosial manajemen pabrik dan masyarakat sekitar.	3	Kondisi sistem pengamanan (personil, alat, SOP)	3	3



Dan seterusnya

c. TAHAP 3: PERENCANAAN MITIGASI RISIKO PANDEMI COVID-19

Tahap ini merupakan tahapan untuk merencanakan upaya-upaya mitigasi terhadap skenario ancaman yang telah teridentifikasi. Upaya mitigasi tersebut harus spesifik dan mencakup beberapa hal berikut:

1. Menentukan target mitigasi;
2. Merencanakan tindakan untuk mitigasi;
3. Penjadwalan pelaksanaan tindakan;
4. Kebutuhan (sumber daya) untuk melaksanakan tindakan mitigasi;
5. Penanggung jawab pelaksanaan tindakan mitigasi.

Hasil yang diharapkan dalam tahap ini adalah sebuah matrik rencana kegiatan untuk mitigasi risiko terhadap pandemi COVID-19.

Hal-hal berikut ini dapat dijadikan referensi dalam mempersiapkan kegiatan/upaya mitigasi risiko pandemi COVID-19:

1. Standar Prosedur Operasional.

Informasi dan data penting terkait dengan operasional perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan, seperti:

- a) Apakah informasi penting tersebut telah tercatat dan dikelola?
- b) Apakah semua pekerja yang terkait mengetahui informasi penting tersebut?

Untuk memastikan hal-hal tersebut, sangatlah penting untuk menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dapat menjelaskan:

- a) instruksi jelas yang dapat memastikan keberlangsungan proses-proses penting
- b) cara menghindari ketidakefisiensian
- c) *back up* data penting
- d) penyimpanan data alternatif dan lain-lain.
- e) tentukan hirarki pengambil keputusan dan komando dalam keadaan darurat jika pengambil keputusan berhalangan.

Pada tingkat pandemi yang berbeda, kemungkinan terjadi ketidakhadiran pekerja pada unit esensial. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, perlu dipertimbangkan suatu pelatihan silang (*cross-skilling/cross-training*) antar pekerja. Diagram alur kerja atau standar prosedur operasional yang harus dikerjakan perlu dibuat untuk memudahkan pekerja yang akan menggantikan pekerja lain.

2. Cara Kerja yang Fleksibel.

Buat perencanaan mekanisme kerja yang fleksibel untuk mengantisipasi kemungkinan dampak pandemi COVID-19. Penerapan cara kerja yang fleksibel, salah satu contohnya adalah bekerja dari rumah atau dari lokasi lain yang aman atau hanya pekerja pada unit esensial saja yang masuk kerja. Jika hal tersebut juga tidak memungkinkan, pertimbangkan untuk menurunkan produksi/aktivitas bahkan jika perlu, penghentian sementara kegiatan perusahaan.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, perusahaan harus mempertimbangkan perubahan dari mekanisme kerja yang biasa dilakukan kearah mekanisme kerja fleksibel untuk mencapai keseimbangan antara faktor keselamatan dengan kewajiban masuk kerja.

3. Rantai pasokan.

Perencanaan keberlangsungan usaha bukanlah komponen mandiri yang bisa berdiri sendiri. Salah satu hal penting yang berpengaruh besar adalah kesiapan dari pemasok utama. Kesiapan mereka akan sangat mendukung keberhasilan rencana kesiapsiagaan usaha. Pastikan pemasok utama mempunyai rencana kesiapsiagaan, dan ada upaya yang memastikan bahwa barang pasokan bebas dari paparan/kontaminasi. Jika belum, ajak dan bimbing mereka untuk mempersiapkannya.

4. Komunikasi.

Informasi dan pengetahuan tentang pandemi COVID-19, penyebab, cara pencegahannya dan bagaimana sikap dan respon dari perusahaan perlu diketahui oleh semua pekerja. Karena itu, perlu untuk membentuk atau memberdayakan "tim komunikasi perusahaan" untuk melakukan komunikasi risiko pandemi COVID-19. Dalam situasi darurat, tim ini berwenang untuk mengatur dan menjamin lancarnya komunikasi internal maupun eksternal. Komunikasi internal diperlukan untuk selalu berhubungan dengan pekerja atau unit-unit terkait, sehingga segala instruksi, penanganan maupun bantuan bagi pekerja bisa berjalan lancar. Nomor khusus/*hotline* mungkin perlu diaktifkan, dan pastikan bahwa seluruh daftar kontak selalu diperbaharui secara berkala.

5. Kebijakan kepegawaian.

Kaji ulang kebijakan tentang SDM perusahaan (misal: cuti sakit, perjalanan, kompensasi, lembur, dll) terkait dengan dampak-dampak yang mungkin timbul karena pandemi COVID-19.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keselamatan dan Kesehatan kerja sangatlah penting untuk menjamin pekerja dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dapat mencegah risiko penularan di perusahaan khususnya melalui upaya preventif dan promotif. Upaya preventif dan promotif di perusahaan dalam rangka pencegahan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan kerja. Pengendalian lingkungan kerja mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan penularan penyakit.

Langkah-langkah pencegahan penularan perlu mulai dipraktekkan di perusahaan, antara lain:

1) Pola hidup bersih dan sehat

- a) cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- b) menerapkan etika batuk dan bersin
- c) menerapkan *physical distancing*

2) Penerapan hygiene dan sanitasi perusahaan

3) Pembatasan kontak antar pekerja

4) Pemakaian alat pelindung diri pernapasan untuk mengurangi penularan antar manusia.

5) Penerapan gizi kerja

Kegiatan mitigasi risiko pandemi COVID-19, sebagai berikut:

1. Analisis kerentanan terhadap kegiatan usaha.

a) Tujuan

Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) oleh perusahaan dari setiap skenario ancaman yang diprioritaskan penanganannya.

b) Output

Spesifikasi risiko yang dapat diterima setiap skenario ancaman yang diprioritaskan penanganannya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Berdasarkan prioritas skenario ancaman yang sudah di tentukan sebelumnya, lakukan curah pendapat (*brainstorming*) untuk melihat risiko riil apakah yang harus ditanggung perusahaan apabila skenario tersebut benar-benar terjadi.

Langkah 2: Diskusikan dalam tim, sejauh mana batas kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko dari setiap skenario ancaman. Hasilnya boleh jadi akan jauh lebih rendah dari risiko yang terkandung dalam ancaman tersebut.

Contoh:

Berdasarkan data yang diperoleh dari pandemi sebelumnya, angka ketidakhadiran karyawan (*absenteisme*) mencapai 40%. Perusahaan praktis akan lumpuh jika kehilangan karyawan sebanyak itu. Dari diskusi yang terjadi, tim sepakat bahwa agar perusahaan dapat terus beroperasi hanya mampu menanggung *absenteisme* maksimal 15%. Angka 15% inilah yang menjadi target mitigasi perusahaan.

2. Merencanakan tindakan untuk mitigasi.

Guna mencapai suatu target mitigasi, perlu dilakukan serangkaian tindakan tertentu. Tindakan tersebut harus dapat mencapai target mitigasi yang telah ditetapkan.

a) Tujuan

Menyusun rencana tindakan untuk mencapai target mitigasi.

b) Ouput

Rencana tindakan untuk mencapai target mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Tentukan target mitigasi.

Upayakan agar target mitigasi ditetapkan serealistis mungkin, sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Langkah 2: Jabarkan masing-masing target mitigasi yang sudah disusun dengan tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.

- 1) Tindakan mitigasi untuk mencapai target mitigasi bisa terjadi lebih dari satu.
- 2) Informasi dari tindakan tersebut sebaiknya bersifat detail, jelas dan bisa diukur hasilnya.

Langkah 3: Periksa kembali kemungkinan pelaksanaan tindakan yang disusun dan kemungkinan untuk mewujudkan target tersebut (target mitigasi bisa dilaksanakan secara bertahap berdasar kemampuan dan ketersediaan sumber daya).

- 1) Apakah target yang ditetapkan terlalu optimistis atau sebaliknya, terlalu pesimistis?
- 2) Apakah langkah yang direncanakan benar-benar dapat dilakukan?

3. Penjadwalan pelaksanaan tindakan

a) Tujuan

Menyusun jadwal rencana tindakan untuk mencapai target mitigasi.

b) Output

Jadwal rencana tindakan untuk target mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Buatlah estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan rencana setiap tindakan mitigasi yang telah ditetapkan.

- Tentukan satuan waktunya secara jelas, sehingga mudah dikontrol dan dikendalikan.

Langkah 2: Periksa kembali apakah pekerjaan perencanaan tersebut dalam diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

- Segera lakukan perbaikan apabila ternyata waktu yang ditetapkan terlalu panjang atau sebaliknya, terlalu pendek.

4. Kebutuhan untuk melaksanakan tindakan mitigasi

a) Tujuan

Menentukan kebutuhan/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tindakan guna mencapai target mitigasi.

b) Output

Daftar kebutuhan untuk melaksanakan pelaksanaan tindakan mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Identifikasikan serinci mungkin sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tindakan mitigasi.

Langkah 2: Rincikan setiap kebutuhan sumberdaya yang teridentifikasi.

- Kebutuhan tersebut dapat berupa kebijakan, kewenangan, material, dana dan personil.

Langkah 3: Periksa setiap rincian kebutuhan sumberdaya dengan seksama.

- Pastikan bahwa perusahaan mampu menyediakannya. Bila tidak, carilah alternatif lain yang sesuai dengan kekuatan perusahaan.

5. Penanggung jawab pelaksanaan mitigasi

a) Tujuan

Menentukan personel yang akan bertanggungjawab pada pelaksanaan tindakan mitigasi.

b) Output

Daftar personel yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tindakan mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Identifikasikan kualifikasi personel yang diperlukan untuk duduk sebagai penanggungjawab pelaksanaan tindakan mitigasi.

- Perhatikan dengan teliti setiap tindakan mitigasinya, karena sebagian besar merupakan serangkaian mata rantai aktivitas yang melibatkan beberapa unit kerja yang berbeda.

Langkah 2: Tetapkan nama personil dan jabatannya.

Langkah 3: Jika lebih dari satu orang, tetapkan koordinatornya.

Contoh Pelaksanaan Tahap 3

PT. XYZ
(Perusahaan Pertenunan)
PERENCANAAN MITIGASI

No	Skenario Ancaman	Target Mitigasi	Perencanaan Tindakan	Perencanaan Tindakan	Kebutuhan Sumberdaya	Penanggung- jawab
	Karyawan sakit > 30%	Karyawan sakit maksimal 5 %	1. Menyusun materi dan strategi penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat 2. Menyusun SOP untuk pengendalian penularan ditempat kerja. 3. Menyiapkan ventilator udara tambahan dalam ruang produksi 4. Menyiapkan prosedur penambahan beban kerja.	1. Satu bulan.	1. Dana 2. Personel penyuluh	1. Manager SDM 2. Manager Teknik 3. Manager Keuangan. 4. Manager <i>Safety</i>

	Pasokan benang terganggu	Stok benang aman selama 6 bulan pasca deklarasi pandemi COVID-19.	1. Evaluasi perusahaan pemasok benang. 2. Persiapan gudang. 3. <i>Listing</i> pembeli utama.	SDA	1. Dana 2. Space gudang 3. Tenaga bongkar muat	1. Manager Logistik 2. Manager Produksi 3. Manager Pemasaran
	Pencurian dalam area perusahaan.	Pencurian nihil	1. Penguatan perimeter. 2. Penguatan Satuan Pengamanan. 3. Penguatan peralatan pengamanan.	SDA	1. Personil 2. Dana 3. Peralatan pengamanan	1. Manager SDM 2. Manager Logistik 3. Manager Keamanan

d. TAHAP 4: IDENTIFIKASI RESPON DAMPAK PANDEMI COVID-19

1. Tujuan

- a) Mendefinisikan situasi pemicu aktivasi respon dampak pandemi COVID-19.
- b) Mengidentifikasi respon yang dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Setelah melakukan identifikasi upaya-upaya mitigasi terhadap skenario ancaman dari pandemi COVID-19, perencanaan selanjutnya adalah identifikasi respon terhadap dampak pandemi COVID-19. Pada saat mulai munculnya pandemi perusahaan juga sudah harus melakukan upaya-upaya respon spesifik yang disesuaikan dengan situasi perkembangan pandemi itu sendiri.

Dalam menidentifikasi tindakan/upaya respon yang spesifik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

Identifikasi situasi pemicu aktivasi (trigger) respon. Dalam melakukan identifikasi dapat dipertimbangkan berdasarkan (i) situasi penyebaran geografis dari pandemi dan/atau (ii) tingkat keparahan dari pandemi COVID-19 tersebut.

Tentukan target respon dari skenario ancaman yang ada berdasarkan situasi pemicu respon yang telah teridentifikasi. Target respon ini dapat mengacu pada target mitigasi yang sudah direncanakan sebelumnya.

- a) Tentukan tindakan respon yang telah ditetapkan berdasarkan rencana mitigasi sebelumnya dengan penyesuaian sesuai situasi pemicu responnya.
- b) Lakukan penilaian kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tindakan respon.
- c) Tentukan penanggung jawab setiap tindakan respon.

Pada saat terjadinya pandemi COVID-19, hal-hal dibawah ini juga perlu dipastikan telah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya, agar perusahaan menjadi tempat yang aman dari potensi penularan dan keberlangsungan kegiatan usaha juga dapat terjaga.

a) Pekerja

Upaya-upaya pencegahan penularan di perusahaan misalnya kebersihan, pembatasan sosial (*social distancing*), penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai perlu dilaksanakan. Pastikan bahwa pekerja telah dibekali dengan informasi yang cukup tentang upaya pencegahan penularan dan cara-cara penggunaan APD dengan benar.

Perhatikan juga sarana transportasi yang aman bagi pekerja, tergantung dari keseriusan dampak dari pandemi COVID-19 dan kebutuhan perusahaan, pertimbangkan juga kemungkinan bahwa akan ada pekerja esensial yang harus tetap tinggal di perusahaan selama pandemi COVID-19 berlangsung.

b) Pelanggan dan pemasok

Pertahankan komunikasi dengan pelanggan dan pemasok, pastikan bahwa mereka mengetahui bahwa perusahaan telah siap dan sanggup menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Selalu perbaharui data-data pelanggan, dan usahakan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Lakukan kajian untuk mengurangi biaya pengiriman
- 2) Tinjau kemungkinan untuk melakukan diversifikasi dalam produksi, untuk menyebar risiko diantara kategori produk yang berbeda.

c) Komunikasi

Manfaatkan tim komunikasi yang telah dibentuk untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan, terutama informasi keluar baik ke pelanggan maupun pemasok. Sampaikan pesan-pesan tentang kesiapan dan perhatikan "komunikasi risiko" untuk menghindari kepanikan dan ketakutan. Karena itu, perlu untuk mempersiapkan strategi komunikasi pada saat kondisi darurat sebelum terjadi.

2. Output

- a) Situasi pemicu aktivasi respon pandemi COVID-19 teridentifikasi.

- b) Perencanaan dan tim penanggulangan pandemi COVID-19 terbentuk.
 - c) Langkah operasional tindakan yang harus dilakukan pada saat pandemi COVID-19 (SOP).
3. Langkah pelaksanaan
- Langkah 1: Situasi pemicu aktivasi respon pandemi diidentifikasi berdasarkan:
- a) Analisa situasional yang dilakukan oleh tim manajemen perusahaan berdasarkan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
 - b) Referensi dari asosiasi usaha atau perusahaan lain.
 - c) Referensi dari otoritas kesehatan setempat.
 - d) Referensi dari Badan Kesehatan Dunia.
- Langkah 2: Tentukan target respon berdasarkan situasi aktivasi respon yang diharapkan. Target mitigasi ini dapat mengacu kepada target mitigasi yang sudah di rencanakan sebelumnya.
- Langkah 3: Berdasarkan target respon yang telah ditetapkan sebelumnya, tentukan tindakan respon yang sesuai untuk mencapai target tersebut. Tindakan respon tersebut bisa didasarkan pada rencana tindakan mitigasi yang telah ada (SOP yang telah terbentuk sebelumnya) dengan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas tindakan respon
- Langkah 4: Lakukan penilaian kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan penanggulangan/respon yang telah ditetapkan. Penanggulangan kebutuhan sumberdaya tersebut dapat berasal dari dukungan internal atau eksternal perusahaan. Pada kondisi wabah sebaiknya lebih menggantungkan kepada pasokan kebutuhan dari dalam perusahaan.

Langkah 5: Tentukan penanggungjawab setiap tindakan respon.

- a) Penentuan penanggungjawab setiap tindakan respon dapat didasarkan pada alokasi personel yang sudah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya.
- b) Disisi lain ada kemungkinan personel yang sudah dialokasikan berhalangan (absen) karena sakit atau merawat keluarga yang sakit. Oleh karena itu tim penanggulangan pandemi COVID-19 harus mencari pengganti penanggungjawab tersebut. Parameter untuk menentukan personil pengganti adalah:
 - 1) Kesetaraan kemampuan dan kecakapan.
 - 2) Kesetaraan pengalaman kerja.
 - 3) Jenjang dalam organisasi perusahaan.

Contoh Pelaksanaan Tahap 4

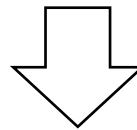
PT. XYZ

(Perusahaan Pertenunan)

RESPON DAMPAK PANDEMI COVID-19

No	Situasi pemicu aktivasi respon	Skenario ancaman	Target respon	Tindakan pengendalian	Kebutuhan Sumber daya	Penanggung Jawab
1	WHO menyatakan dunia dalam pandemi dan episenter muncul diluar Indonesia	Karyawan sakit > 30%	Penularan tidak terjadi di tempat kerja	1. Penyegaran penyuluhan PHBS dan informasi tentang pandemi COVID-19 dan pencegahannya. 2. Penerapan <i>screening</i> suhu tubuh bagi karyawan dan pengunjung yang datang dari daerah terkena dampak/kemungkinan kontak	1. Dana 2. Ruang penyuluhan 3. Petugas K3 4. Peralatan penyuluhan 5. SOP <i>screening</i> 6. alat pengukur suhu	1. Manajer <i>Safety</i> 2. Manajer SDM 3. Dokter/Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Kerja
		Pasokan benang terganggu	Stok benang aman selama 6 bulan pasca deklarasi	Melakukan penambahan stok benang dari beberapa pemasok terseleksi.	1. Dana 2. Gudang tambahan 3. Tenaga bongkar-muat	1. Manager Logistik. 2. Manager Produksi 3. Manager Pemasaran

			pandemi COVID-19.			
		Pencurian dalam area perusahaan.	Pencurian nihil.	1. Memperkuat perimeter. 2. Memperkuat Satuan Pengamanan. 3. Memperkuat peralatan PAM.	1. Personil 2. Dana 3. Peralatan pengamanan	1. Manager SDM 2. Manager Logistik 3. Manager <i>Security</i>
2	Telah terjadi penularan yang meluas di Indonesia dan wilayah sekitar tempat usaha	Karyawan sakit > 30%	Karyawan sakit maksimal 5% dan penularan tidak terjadi di tempat kerja	1. Penerapan <i>screening</i> suhu tubuh dan gejala ILI bagi karyawan dan pengunjung 2. Penerapan pembatasan kontak (<i>social distancing</i>) ditempat kerja 3. Penanganan karyawan sakit flu di perusahaan	1. SOP <i>screening</i> 2. alat pengukur suhu 3. SOP pembatasan kontak ditempat kerja 4. SOP Penanganan Karyawan Sakit di Perusahaan, ruang isolasi, Masker, no telp. Rumah Sakit	1. Manajer <i>Safety</i> 2. Manajer SDM 3. Dokter/Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Kerja



Dan seterusnya

e. TAHAP 5: MERANCANG DAN MENGIMPLEMENTASIKAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA

1. Merancang perencanaan

Seluruh informasi terkait yang telah diidentifikasi melalui tahap-tahap sebelumnya digabungkan dalam kerangka perencanaan keberlangsungan usaha dalam sebuah matriks.

Siapkan respon untuk beberapa skenario tingkat keparahan pandemi COVID-19 yang berbeda:

- a) pandemi ringan/sedang;
- b) pandemi berat.

Pertimbangkan tingkat keparahan yang berbeda yang mungkin diakibatkan pandemi COVID-19, perencanaan keberlangsungan usaha harus memperkirakan beberapa skema operasi, mulai dari aktivitas rutin hingga model khusus/darurat, bahkan sampai pada penghentian sementara kegiatan usaha. Pertegas tindakan yang diperlukan untuk kesiapsiagaan, respon dan pemulihan dari kondisi darurat.

Manfaatkan tim darurat/tim penanggulangan pandemi COVID-19 untuk mulai merancang perencanaan keberlangsungan usaha. Siapkan respon yang disusun berdasarkan skenario tingkat keparahan dari pandemi COVID-19 yang mungkin muncul. Perencanaan harus mencakup seluruh skema operasi dari perusahaan, mulai dari aktivitas rutin perusahaan sampai ketingkat penghentian usaha sementara.

Kerangka yang bisa dipergunakan adalah seperti contoh berikut:

- a) Data rinci organisasi/perusahaan.

Daftar kontak perusahaan secara rinci dan dijaga kemutakhirannya.

- b) Tim darurat atau tim penanggulangan pandemi COVID-19 (kontak dan peran).

Identifikasi orang-orang di perusahaan yang menjadi Tim Darurat/Penanggulangan Pandemi COVID-19 (ingat, staf/pekerja kunci telah diidentifikasi pada TAHAP 1).

Tim ini harus dibedakan dengan tim yang bertugas untuk menyusun rencana kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi COVID-19. Tim darurat/penanggulangan pandemi COVID-19 adalah tim yang terdiri dari manager dan pekerja

yang diperkirakan tetap bekerja selama pandemi COVID-19 terjadi (staf/pekerja kunci).

- c) Peran dan tanggung jawab harus disebutkan dengan jelas pada rencana serta kemungkinan penggantian (personel cadangan). Disarankan sebelum terjadi wabah penyakit, manajer atau staf yang yang diperkirakan bekerja selama wabah terjadi, bergabung dalam suatu diskusi bersama para pekerja secara bersama menyetujui parameter yang akan mendefinisikan tanggung jawab pekerja dan manajemen.

Selama diskusi dengan para pekerja, isu-isu berikut bisa diangkat:

- 1) Tanggung jawab manajemen untuk memindahkan/menghindarkan orang yang sakit dari lingkungan kerja.
- 2) Tanggung jawab manajemen untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, jika relevan dengan situasi lingkungan kerja.
- 3) Tanggung jawab manajemen untuk menyediakan perlindungan, seperti obat-obatan, bila tersedia, untuk mereka dengan risiko lingkungan kerja yang meningkat.
- 4) Tanggung jawab dari pekerja untuk bekerjasama atas setiap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 5) Tanggung jawab dari manajemen untuk membantu pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
- 6) Pemberdayaan komite bersama manajemen – pekerja untuk membahas masalah keselamatan lingkungan kerja.
- 7) Keikutsertaan dari pekerja dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan siapa saja yang wajar untuk dibebaskan dari pekerjaan di area dengan peningkatan risiko. Kelompok-kelompok tersebut bisa terdiri atas:
 - i. pekerja hamil atau sedang menyusui;
 - ii. pekerja lebih tua;
 - iii. pekerja dengan kondisi medis yang bisa meningkatkan risiko mereka tertular atau meninggal karena penyakit;
 - iv. pekerja dengan kesulitan sosial atau psikis;

- 8) Komitmen terus menerus dari manajemen untuk merespon dengan tepat jika seorang pekerja memiliki perhatian khusus atas keselamatan.
- 9) Perlindungan pekerja dari setiap tindakan in-disipliner jika mereka, dengan niat baik, merasa ada suatu pelanggaran dalam kesehatan dan keselamatan kerja yang mengakibatkan mereka mengeluhkan kondisi kerja mereka
Saat manajemen dan pekerja telah mengembangkan suatu sistem, berdasarkan pedoman pemerintah, yang menawarkan keseimbangan yang wajar antara perlindungan dan tanggung jawab dari pekerja, para pekerja harus diinformasikan dan patuh dengan keputusan tersebut.
- d) Detil kontak eksternal
Siapakan daftar yang memuat data seluruh kontak /pihak yang berkepentingan dari luar yang berurusan dengan usaha. Daftar ini harus dijaga dan dimutakhirkan secara berkala.
- e) Prosedur dan respon terhadap skenario.
Untuk setiap kemungkinan kejadian, identifikasi tindakan yang diperlukan, keterlibatan tanggung jawab dan dukungan dokumen serta sumber daya.
Setiap tim atau unit harus menyusun prosedur spesifik ini sebagai SOP mitigasi dan respon terhadap pandemi COVID-19.

TAHAP 5 – Kerangka Merancang dan Mengimplementasikan Rencana Keberlangsungan Usaha

RENCANA TINDAKAN

Rincian Data Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT. XYZ
Alamat	xxx
Lokasi (Rujukan arah jalan)	xxx
No Telp	xxxxxx
No Fax	xxxxxx
Alamat email	manajemen @ptxyz.co.id

Tim Darurat/Penanggulangan Pandemi COVID-19 – Kontak dan Tugas

Nama	No Telp Kantor	Telp. rumah dan HP	Tugas pada saat kondisi darurat
1. Bapak A Cadangan: Bapak B	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	Penanggungjawab Logistik
2. Bapak C Cadangan: Ibu D	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	Penanggungjawab Produksi dan Teknik
3. Bapak E Cadangan: Ibu F	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	Penanggungjawab Keuangan
4. Bapak G Cadangan: Bapak H	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	-xxxxxxxxxx -xxxxxxxxxx	Penanggungjawab SDM, <i>Safety dan Security</i>

TAHAP 5 – Kerangka Merancang dan Mengimplementasikan Rencana Keberlangsungan Usaha

Rincian Kontak Eksternal

Institusi dan Nama(+cadangan) pisahkan kolom ini	No Telp Kantor	Telp. rumah dan HP	Tugas pada saat kondisi darurat
Polisi Kapolsek Wakapolsek	-xxxxxxxxx	-xxxxxxxxx	Dukungan pengamanan apabila situasi keamanan setempat memburuk.
Pemadam Kebakaran		-xxxxxxxxx	Dukungan emergensi
RS - Ambulan	-xxxxxxxxx	-xxxxxxxxx	Dukungan kesehatan
Perusahaan Asuransi	-xxxxxxxxx	-xxxxxxxxx	Mencakup risiko kerugian perusahaan yang dipertanggungkan
Kontraktor	-xxxxxxxxx	-xxxxxxxxx	Dukungan teknis produksi dan <i>maintenance</i>
Pemasok	-xxxxxxxxx	-xxxxxxxxx	Dukungan bahan baku dan bahan penunjang
Asosiasi Pengusaha, Instanssi terkait	-xxxxxxxxx	-xxxxxxxxx	Menyediakan informasi situasi pemicu terbaru dari instansi pemerintah terkait dan mendistribusikannya di kalangan pengusaha.

TAHAP 5 – Kerangka Merancang dan Mengimplementasikan Rencana Keberlangsungan Usaha

Prosedur Tim <i>Security</i> dan <i>Safety</i>				
Tim: <i>Security</i>		Manajer: Bapak G Manajer Cadangan: Bapak H		
Sebelum kejadian – Tahap Persiapan				
	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu (Jam/hari)	Dukungan Dokumen/ Sumber Daya
	Menyusun prosedur SRA dan SOP <i>screening</i> dll.	Manajer <i>Security</i>	20 hari	Manual Pengamanan Perusahaan, personil, komputer.
	Melaksanakan SRA	<i>Security Officer</i>	7 hari	Personil dan ceklist SRA
	Presentasi hasil SRA	Manajer <i>Security</i>	1 hari	LCD Projector, laptop
	Tindak lanjut atas rekomendasi temuan	1. Manajer <i>Security</i> 2. Manajer Logistik	30 hari	Dana
Sebelum kejadian – Tahap Persiapan				
Situasi pemicu aktivasi	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu (Jam/hari)	Dukungan Dokumen/ Sumber Daya
WHO menyatakan dunia dalam pandemi dan	1. Penyegaran penyuluhan PHBS dan informasi	1. Manajer <i>Security</i> 2. Manajer <i>Safety</i>	1 jam setelah situasi pemicu teridentifikasi	SOP <i>Screening</i> Karyawan di Pintu Masuk

episenter muncul diluar Indonesia	tentang pandemi COVID-19 dan pencegahannya. 2. Penerapan <i>screening</i> suhu tubuh bagi karyawan dan			Perusahaan, termometer infra merah, Log Book hasil pemeriksaan.
-----------------------------------	---	--	--	---

f. TAHAP 6: MENGGOMUNIKASIKAN PERENCANAAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA

1. Sebarkan Perencanaan Keberlangsungan Usaha.

Perencanaan yang telah disusun sangat penting untuk disosialisasikan secara internal (kepada pekerja dan jajaran manajemen) maupun secara eksternal (pelanggan, pemasok, dan lain-lain). Strategi komunikasi perlu disusun dengan memperhatikan:

- a) Kapan harus disampaikan detail rencana kepada pekerja, pihak luar atau pihak yang berkepentingan.
- b) Alat atau metode apa yang paling efektif dalam melakukan komunikasi untuk masing-masing sasaran.

2. Komunikasi Internal.

Dalam melakukan komunikasi internal, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Menginformasikan secara jelas tentang penyakit ini dan bagaimana pencegahan serta penanganannya, jangan lupa bahwa pekerja juga harus meneruskan informasi ini kepada keluarga dan lingkungan mereka.
- b) Menginformasikan tentang perubahan kebijakan SDM/kepegawaian yang mungkin terjadi seperti kebijakan terkait perjalanan, cuti sakit dan kompensasi atas pembatasan aktivitas ekonomi sementara.
- c) Melakukan kajian ulang cara berkomunikasi yang akan dipergunakan, jaringan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan mempertimbangkan alternatif sistem komunikasi lain.
- d) Konsultasikan dan berikan umpan balik secara berkala untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi pada pekerja.
- e) Diperkirakan selama pandemi COVID-19, banyak pekerja yang menolak untuk pergi bekerja. Ketakutan tersebut bisa dipahami, hal ini tergantung dari kondisi keselamatan di lingkungan kerja. Permasalahan ini harus dibahas dalam suatu forum yang objektif sehingga pekerja tidak merasa diabaikan atau tidak diperhatikan.

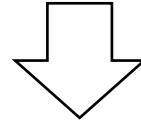
3. Komunikasi Eksternal

- a) Siapkan pesan-pesan yang jelas dan secara akurat diarahkan kepada pihak luar yang berkepentingan (pemasok, pelanggan, dan lain-lain) untuk mencegah ketakutan dan kepanikan.
- b) Bekerjasama dengan organisasi lain dan berbagi pengalaman yang dapat dipetik dari perencanaan keberlangsungan usaha pihak lain.
- c) Tetapkan satu petugas khusus (*contact person*) untuk berkomunikasi dengan instansi pemerintah atau lembaga kesehatan dalam mengoptimalkan pemahaman dan komunikasi atas rencana-rencana lain serta apa yang bisa disediakan selama pandemi COVID-19.

TAHAP 6 – Kerangka Mengkomunikasikan Rencana

Tujuan	Target Kelompok	Pesan Utama	Alat Komunikasi	Catatan
Pertegas tujuan yang harus dicapai sebagai bagian dari komunikasi perencanaan keberlangsungan usaha.	Identifikasi secara khusus siapa yang perlu menerima informasi/pesan tersebut (misal: karyawan, perwakilan serikat kerja, pelanggan, pemasok, mitra usaha dan lingkungan sekitar).	Rinci informasi yang harus disiapkan pada berbagai tahap kejadian (untuk memastikan tujuan tercapai).	Identifikasi alat-alat yang harus ada untuk mendistribusikan informasi tersebut (misal: kit informasi, lembar fakta, poster di tempat kerja, rapat perencanaan).	Identifikasi kapan, siapa dan bagaimana pesan akan dikomunikasikan, termasuk bagaimana bisa memeriksa tujuan telah tercapai. Sampaikan dengan satu suara melalui Tim Komunikasi Perusahaan.
Memberikan pemahaman akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),	Karyawan, Perwakilan Serikat Kerja.	Karyawan harus mengimplementasikan PHBS di tempat kerja untuk menekan risiko penularan.	Materi presentasi, peralatan presentasi, ruang pertemuan, poster, papan informasi.	Pesan lisan diberikan melalui <i>safety talk</i> setiap pagi sebelum bekerja.
Memberikan informasi kepada pemasok benang tentang perencanaan yang	Perusahaan produsen benang yang sudah	1. Informasi tentang perencanaan keberlangsungan usaha	1. Internet 2. <i>Business meeting</i> .	

telah dibuat untuk suplai bahan baku.	diseleksi oleh Team Logistik	yang telah disusun, yang dapat berdampak pada pemesanan 2. Motivasi kepada <i>suplier</i> untuk mulai membuat rencana keberlangsungan usaha terhadap ancaman pandemi COVID-19		
---------------------------------------	------------------------------	--	--	--



Dan seterusnya

g. TAHAP 7: UJI PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA

Dalam siklus perencanaan, selalu ada komponen untuk menguji rencana yang telah disusun untuk keperluan perbaikan dari perencanaan tersebut. Pengujian terhadap suatu rencana harus dilakukan secara teratur untuk selalu dapat mengidentifikasi masalah baru dan merumuskan pemecahannya. Terutama pada bagian standar prosedur operasional (SPO), harus selalu dilakukan uji dan kajian untuk memastikan bahwa standar tersebut masih relevan dan bisa dilaksanakan dengan efektif.

Ceklis sederhana dapat dipergunakan untuk menilai rencana yang telah disusun. Upaya kaji ulang terhadap SPO dan perencanaan keberlangsungan usaha perlu juga dilakukan dengan menggunakan simulasi, *table top*, *drill*, dan-lain-lain.

TAHAP 7 – Kerangka Uji Rencana

DAFTAR PERIKSA PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA

Pertanyaan	YA	TIDAK
Apakah Produk dan layanan yang paling penting dari organisasi/perusahaan telah diketahui? Jika ya, sudahkah didokumentasikan?	X	X
Apakah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap usaha dan perusahaan telah diketahui? Jika ya, apakah dampak-dampak tersebut sudah didokumentasikan?	X X	
Apakah staf/pekerja kunci dalam perusahaan dan peran mereka telah diketahui? Jika ya, sudahkah didokumentasikan?		X X
Apakah ketrampilan utama yang dibutuhkan untuk terus menghasilkan produk/layanan utama telah diketahui? Jika ya, sudahkah didokumentasikan?	X	X
Apakah sudah diketahui berapa lama kegiatan usaha bisa terus beroperasi dengan pekerja dan sumber yang terbatas? Jika ya, sudahkah didokumentasikan?		X X
Apakah ahli dan/atau peralatan yang diperlukan untuk operasional penting telah diidentifikasi? Jika ya, sudahkah dirincikan?	X	X
Apakah telah diketahui, pemasok mana yang penting agar terus beroperasi? Jika ya, adakah pilihan alternatif yang tersedia?	X X	
Sudahkah diketahui bahwa mereka/pemasok masih mampu menyediakan produk/layanan yang diperlukan? Apakah karyawan/pekerja tahu apa yang harus dilakukan pada saat pandemi COVID-19?		X X

Sudahkah kebijakan pembatasan sosial telah di susun?	X	
Apakah pekerja telah paham dan menerapkan praktek kebersihan pribadi dan praktek-praktek pembatasan sosial?		X
Sudahkah langkah-langkah pembatasan sosial seperti mencoba teknologi jika pekerja bekerja di rumah, membuat fasilitas konfrensi jarak jauh, dan lain-lain, telah dikaji dan diuji coba?		X
Apakah detail kontak atas pekerja, pemasok, perwakilan serikat pekerja jika dibutuhkan pada saat kondisi darurat telah ada/ <i>update</i> ?	X	
Apakah informasi ini di simpan di lebih dari satu tempat?		X
Apakah lokasi dan lingkungan perusahaan meningkatkan risiko terjadinya penularan (misal: meja resepsionis terbuka untuk umum)?	X	
Apakah telah tersedia persediaan masker, sarung tangan, deterjen, pembersih alkohol, dan lain-lain?		X
Apakah telah tersedia dana cadangan?	X	
Bisakah karyawan menjalankan tugas yang berbeda untuk memastikan dapat melakukan layanan atau pekerjaan layanan jika diperlukan (misal: sudahkah pekerja diberi pelatihan pekerjaan yang berbeda)?		X
Pada kondisi darurat, apakah pekerja dapat/ mudah mengakses informasi yang dibutuhkan (misal : dapatkah beberapa orang memiliki kunci akses, jalan masuk, kombinasi lemari besi)?		X
Sudahkah kemungkinan langkah-langkah respon dibahas dengan perwakilan serikat pekerja?		X

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB V

PENUTUP

Panduan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini disusun untuk membantu mempersiapkan perencanaan perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perusahaan diharapkan dapat menyusun dan mempunyai perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis usaha masing-masing.

Perusahaan diharapkan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha sehingga dihasilkan perencanaan keberlangsungan usaha yang komprehensif sesuai dengan keadaan atau situasi pandemi yang sedang terjadi.

**Plt. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



Drs. M. Iswandi Hari, SH., M.Si
KRP 63020780